

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: BPK Jateng

## Serahkan Laporan Pemeriksaan Keuangan pada Tiga Kabupaten, BPK Jateng Beri Opini WTP

<https://jateng.tribunnews.com/2021/05/06/serahkan-laporan-pemeriksaan-keuangan-pada-tiga-kabupatenbpk-jateng-beri-opini-wtp>.



"Saya mengapresiasi kepada para bupati dan jajarannya. Proses pemeriksaan dan pelaporan oleh BPK dapat berjalan lancar antara lain karena dukungan dan kerja sama yang baik dari pihak pemda," kata Ayub dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (5/5/2021).

Dalam acara tersebut hadir Bupati dan Ketua DPRD Karanganyar, Juliyatmono dan Bagus Selo; Bupati Boyolali, M Said Hidayat; Bupati dan Ketua DPRD Blora, Arief Rohman dan M Dasum; serta Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPK Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 pada Pemerintah Kabupaten Blora, Karanganyar, dan Boyolali.

Tiga kabupaten tersebut menjadi tiga pemerintah daerah pertama yang menerima LHP atas LKPD pada 2020. BPK Jateng berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion terhadap tiga daerah tersebut.

Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ayub Amali secara langsung menyerahkan LHP atas LKPD 2020 kepada para bupati dan ketua DPRD.

"Secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujarnya. (\*)

Ayub Amali menjelaskan, meski berhasil mempertahankan opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh ketiga pemerintah daerah tersebut.

Ia menjabarkan terkait pengelolaan pendapatan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blora yang belum memadai. Lalu soal pengelolaan aset tetap Pemkab Karanganyar 2020 belum optimal antara lain karena adanya pemanfaatan oleh pihak lain yang belum didukung perjanjian.

"Kemudian, adanya kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali," jelasnya.

Ayub berharap agar hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK dapat mendorong dan memotivasi pemda untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.